

PERSPEKTIF TOKOH MASYARAKAT TENTANG PENDIDIKAN MODERASI BERAGAMA DI KOTA PAREPARE SULAWESI SELATAN



*Khaerun Nisa**

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, Jl.A.P. Pettarani No.72 Makassar, email: kn.khaerunnisa@gmail.com

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:
*Moderasi beragama,
Kota Parepare,
Mappadendang*

Penelitian ini bermuara pada penggalian perspektif tokoh masyarakat terhadap pendidikan moderasi beragama, yang merujuk pada empat indikator yang digagas oleh Kementerian Agama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan akomodatif terhadap budaya lokal. Dalam menggali perspektif tokoh masyarakat terhadap pendidikan moderasi beragama digunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Adapun temuan lapangan yang diperoleh adalah (1) secara umum tokoh masyarakat di Kota Parepare sepakat dengan konsep moderasi beragama yang disusun oleh Kementerian Agama dan urgensinya meregenerasi moderasi beragama ke dalam lembaga pendidikan, (2) konsep moderasi beragama yang belum familiar pada beberapa lapisan masyarakat (3) gagasan materi agama yang disampaikan oleh tokoh agama memuat beberapa ayat terkait empat indikator moderasi beragama, serta pentingnya *hubbul wathan minal iman dan ukhuwah basyariah* (4) Tradisi *Mappadendang* yang menjadi wadah pertemuan dan pembauran untuk menyatukan rasa kebersamaan pemerintah dan masyarakat dari berbagai lapisan etnis dan agama. Sistem *panggaderreng* orang Bugis yang telah mendarah daging *ade', bicara, rapang, wari, dan shara'* (6) tenaga pendidik adalah segmentasi pertama penerapan pendidikan moderasi beragama, sistem pembelajarannya dapat melalui pembentukan kurikulum, terintegrasi maupun injeksi melalui kegiatan ekstrakurikuler, serta atmosfer sekolah yang mendukung sistem (5) sekolah melakukan filterisasi dan melakukan aktivasi kegiatan kerohanian serta menggandeng ormas untuk menumbuhkan pemikiran yang moderat. Dan menghidupkan kembali mata pelajaran muatan lokal, yang tentunya membutuhkan dukungan dari berbagai pemangku kebijakan.

ABSTRACT

Keywords:
*Religious
moderation,
Parepare City,
Mappadendang*

This research leads to exploring the perspective of community leaders on religious moderation education, which refers to the four indicators initiated by the Ministry of Religion, namely national commitment, tolerance, anti-violence and accommodating to local culture. In exploring the perspective of community leaders on religious moderation education, qualitative methods were used with data collection through in-depth interviews. The field findings obtained are (1) in general, community leaders in the City of Parepare agree with the concept of religious moderation compiled by the Ministry of Religion and the urgency to regenerate religious moderation into educational institutions, (2) the concept of religious moderation which is not familiar to some levels of society (3) the idea of religious material presented by religious leaders contains several verses related to the four indicators of religious moderation, as well as the importance of *hubbul wathan minal faith and ukhuwah basyariah* (4) The *Mappadendang* tradition which becomes a forum for meeting and assimilation to unite the sense of togetherness of the government and society from various walks of life ethnicity and religion. The *panggaderreng* system of the Bugis people who have ingrained *ade', talk, rapang, wari, and shara'* (6) educators is the first segmentation of the application of religious moderation education, the learning system can be through curriculum formation, integrated or injection through extracurricular activities, as well as the school atmosphere which supports the

system (5) schools perform filtering and activate spiritual activities as well as cooperating with mass organizations to foster moderate thinking. And revive local content subjects, which of course requires support from various policy stakeholders.

PENDAHULUAN

Kota Parepare merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota ini populer dengan julukannya sebagai Kota Bandar Madani. Julukan tersebut disematkan kepada Kota Parepare berdasarkan aspek sejarahnya, yaitu peran Kota Parepare sebagai pelabuhan yang cukup ramai sejak era tahun 1540-an. Namun Kota Parepare tidak hanya terkenal dengan julukannya sebagai Kota niaga, tetapi juga sebagai ikon Kota santri dan Kota pendidikan. Hal tersebut sejalan dengan terdapatnya sembilan pondok pesantren dengan berbagai keterwakilan identitas aliran keagamaan di Kota Parepare, yaitu pondok pesantren Salafiyah Al-Jawahir, pondok pesantren DDI Lil Banat, pondok pesantren Hafidziyah, pondok pesantren Al-Munawarah, pondok pesantren Al-Badar, pondok pesantren Bahrul Ulum, pondok pesantren Hidayatullah, pondok pesantren Ummul Quro dan pondok pesantren Al-Mustaqim. Selain itu, Kota Parepare tidak hanya kaya akan pesantren dengan beragam identitas aliran keagamaannya, namun demikian juga dengan perguruan tingginya. Hal tersebut semakin menegaskan eksistensi Kota Parepare sebagai ikon Kota santri dan Kota pendidikan. Perguruan tinggi yang dimaksud adalah IAIN Parepare dengan *tagline*-nya akulturasi budaya dan Islam, Universitas Muhammadiyah Parepare dengan *tagline* pendidikan, keahlian, profesional yang Islami dengan motto berilmu amaliah dan beramal ilmiah, serta beberapa kampus bercirikan umum seperti Kampus V Universitas Negeri Makassar di Parepare, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amsir Parepare dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Amsir Parepare.

Kota yang hanya memiliki luas wilayah 99,33 km² ini, telah sejak lama

dihuni oleh masyarakat dengan berbagai latar belakang komposisi etnis, budaya, bahasa dan agama yang beragam dan hidup dengan damai. Meskipun berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Parepare yaitu Parepare dalam angka tahun 2019 menyatakan bahwa struktur penduduk Kota Parepare berdasarkan agama mayoritas beragama Islam yaitu sebanyak 139.390 jiwa atau 94,02%. Sedangkan Protestan sebanyak 5307 jiwa atau 3,58%, Katolik 2028 jiwa atau 1,368%, Hindu 752 jiwa atau 0,507%, Budha 774 jiwa atau 0,52% dan lainnya 5 jiwa atau 0,003%. Kota Parepare tidak hanya dihuni oleh beberapa agama dan kepercayaan-kepercayaan lainnya, namun Kota ini juga dihuni oleh beberapa etnis, baik dari etnis yang berasal dari Sulawesi maupun luar Sulawesi. Etnis-etnis tersebut adalah Bugis Sidrap, Pinrang, Soppeng, Barru, Makassar, Pattinjo, Tolotang, Duri, Mandar, Jawa, Minang, *Chinese* dan lainnya. Meskipun etnis yang mayoritas bermukim di Kota Parepare adalah suku Bugis.

Kemajemukan bagi bangsa Indonesia khususnya di Kota Parepare diyakini sebagai sebuah takdir, sesuatu yang tidak diminta, melainkan pemberian Tuhan yang mencipta, bukan untuk ditawarkan tapi untuk diterima (*taken for granted*). Kemajemukan merupakan suatu rahmat yang patut disyukuri (Yewangoe, 2001). Kemajemukan ini adalah warisan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya (Shihab, 1997). Selain menjadi sebuah kesyukuran, kemajemukan juga merupakan sebuah tantangan, khususnya dalam kehidupan umat beragama karena kemajemukan sarat akan kepentingan atau dengan istilah populer disebut *conflict interest* (Juergensmeyer, 1998). Kemajemukan juga tidak semata diterjemahkan sebagai sesuatu yang merujuk pada kenyataan adanya

kemajemukan itu sendiri, namun yang utama adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam menyikapi fakta kemajemukan tersebut (Halik, Djamaluddin M, and Suraedah, 2017).

Masyarakat Parepare pada umumnya sudah dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang berpikir *cosmopolite*, karena penerimaannya terhadap etnis, budaya, dan agama yang majemuk. Bahkan Kota Parepare beberapa kali bahkan hingga saat ini dipimpin oleh kepala daerah yang bukan bertanah kelahiran Parepare. Rumah-rumah ibadah dibangun berdampingan tanpa adanya tensional dari masyarakat sekitar. Bukti konkret pada lapangan Andi Makkasau dimana pada setiap sudut lapangan berdiri rumah ibadah Gereja Katolik dan Protestan, Vihara dan Masjid Raya Kota Parepare. Meskipun riak-riak konflik di Kota Parepare atas nama agama tentunya juga tidak terhindarkan, seperti polemik pendirian rumah ibadah masjid di Lumpue Kota Parepare tahun 2020. Masjid tersebut tidak kunjung difungsikan sebagai rumah ibadah dikarenakan adanya perbedaan mazhab antara pemilik lahan dan pengola masjid, yang kemudian semula bangunan tersebut sebagai rumah ibadah masjid, namun kini berakhir sebagai lembaga pendidikan anak usia dini.

Pengarus utamaan moderasi beragama di Indonesia, khususnya di Kota Parepare telah mencapai momentumnya, meskipun dalam implementasinya memerlukan perjuangan yang tidak mudah. Selain harus menjadikannya sebagai cara pandang setiap umat beragama, upaya ini juga harus diiringi dengan menjadikannya terintegrasi ke dalam sistem perencanaan pembangunan Indonesia jangka menengah dan jangka panjang, agar program-program yang dijalankan mendapat dukungan semua pihak. Sebagai pendekatan komprehensif dan terpadu, moderasi beragama seyogyanya bukan hanya sekedar nilai partikular tetapi dapat menjadi identitas, visi, corak, dan karakteristik utama pendidikan. Dalam mewujudkannya, maka

diperlukan langkah yang lebih konstruktif dengan menempatkan moderasi beragama sebagai arus utama pendidikan Islam.

Lembaga pendidikan sangat tepat menjadi “laboratorium moderasi beragama”. Seperti yang telah dipahami bahwa bangsa Indonesia khususnya di Kota Parepare memiliki ragam etnis dan agama. Sekolah sebagai institusi pendidikan dapat menumbuhkan pola pikir moderasi beragama dengan kondisi bahwa pandangan eksklusif dan tindakan ekstremisme kekerasan dalam jubah agama akan merusak sendi serta tenun kebangsaan yang majemuk. Di sinilah pentingnya “batu pertama” moderasi beragama dibangun atas dasar filosofi universal dalam hubungan sosial kemanusiaan. Lembaga pendidikan menjadi sarana tepat guna menyebarkan sensitivitas peserta didik pada ragam perbedaan. Membuka ruang dialog, guru memberikan pemahaman bahwa agama membawa risalah cinta bukan benci dan sistem di sekolah leluasa pada perbedaan tersebut. Tidak hanya itu, rekomendasi yang dikeluarkan risalah Jakarta salah satunya berbunyi pemerintah harus memimpin gerakan penguatan keberagaman yang moderat sebagai arus utama, dengan mempromosikan pentingnya kehidupan beragama secara moderat sebagai panduan spiritual dan moral.

Dalam beberapa tahun terakhir secara nasional, kecenderungan munculnya sikap intoleran semakin menguat, baik secara internal umat beragama maupun secara eksternal. Kasus persekusi, pembakaran rumah ibadah, dan semua bentuk tindakan kekerasan kemudian menjadi hal lumrah yang dikedepankan, tawuran antar pelajar menjadi wajah buram bagi institusi pendidikan negara ini. Riset yang dilakukan oleh Maarif Institute tahun 2011, Setara *Institute* tahun 2015, dan Wahid *Foundation* tahun 2016 dalam Sutrisno (2019) menunjukkan bahwa kelompok-kelompok radikal telah secara masif melakukan penetrasi pandangan radikal di kalangan generasi muda melalui institusi pendidikan. Selain itu, Nashuddin

(2020) menyatakan bahwa intoleransi dalam dunia pendidikan semakin meningkat, siswa maupun mahasiswa memiliki kecenderungan sikap intoleransi dan radikalisme cukup mengkhawatirkan, guru pun demikian.

Ruang sekolah sejatinya menjadi lahan tersemainya pesan agama dengan lebih damai, gagasan kebangsaan, dan menanamkan nilai-nilai multikulturalisme serta menebarkan cinta pada kemanusiaan. Hal itu dapat mewujudkan dalam kurikulum yang berorientasi pada moderasi beragama, kegiatan ekstrakurikuler dan lainnya. Sehingga dalam rangka menyusun sistem pendidikan berbasis moderasi beragama, sejumlah gagasan dan perspektif perlu dihimpun. Gagasan dan perspektif seyogyanya digali dari tokoh masyarakat yang telah diakui memiliki kompetensi dan keahlian di bidangnya, terutama berkaitan sistem pendidikan yang akan dimasukkan sebagai bagian dari sistem pendidikan moderasi beragama tersebut. Secara substansial muatan sistem pendidikan moderasi beragama hendaknya mencakup, nilai-nilai ajaran dari berbagai agama dan nilai-nilai budaya dari berbagai etnis. Sehingga, merujuk pada kepentingan tersebut, maka sumber gagasan dan perspektif dari tokoh agama dan tokoh adat. Untuk kepentingan metodologi pendidikan nantinya dapat mencakup pendekatan, strategi, metode serta teknik pendidikan. Kepentingan ini tentunya gagasan dan perspektif sistem pendidikan diperoleh dari tokoh pendidikan. Dan yang terakhir adalah sistem penerapannya yang mencakup produk regulasi atau aturan perundang-undangan, yang tentunya diperoleh dari tokoh pemerintahan dan legislatif. Dalam mencapai tujuan tersebut, maka urgen untuk melakukan studi ilmiah untuk menjangkau gagasan dan perspektif sistem pendidikan moderasi beragama dari tokoh masyarakat dalam hal ini tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidikan, tokoh pemerintahan maupun tokoh legislatif.

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah penelitian ini adalah bagaimana

perspektif tokoh masyarakat tentang pendidikan moderasi beragama meliputi tentang substansi materi pendidikan moderasi beragama, pendekatan sistem pembelajaran pendidikan moderasi beragama dan kebijakan pemberlakuan sistem pendidikan moderasi beragama.

KAJIAN PUSTAKA

A. Perspektif

Secara harfiah, perspektif diartikan sebagai persepsi visual seseorang. Saat melihat sesuatu benda, maka manusia memandangnya dari posisi tertentu, mungkin dari depan, samping atau belakang. Persepsi visual manusia terhadap suatu benda yang dipandang dari posisi tertentu, itulah yang disebut perspektif. Jadi ia merupakan cara bagaimana objek terlihat pada mata manusia berdasarkan posisi mata, relatif, terhadap objek. Namun jika objek persepsinya benda abstrak, maka perspektif dirumuskan secara abstrak juga. Perspektif dapat diartikan sebagai cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi atau sudut pandang tertentu yang digunakan untuk melihat suatu fenomena (Ridhuan 2019).

Persepsi juga mengandung gagasan. Karenanya, Perspektif pada hakikatnya merupakan gagasan seseorang terhadap sesuatu. Hampir setiap hari orang-orang selalu mengungkapkan perspektifnya (gagasannya) mengenai berbagai macam hal. Setiap orang selalu mengungkapkan perspektif (gagasan)-nya dapat berbagai media, baik dalam diskusi formal, artikel ilmiah, maupun dalam perbincangan sehari-hari. Karenanya perspektif dapat diartikan sebagai cara seseorang menilai sesuatu, baik dipaparkan melalui tulisan atau lisan.

B. Pendidikan

Pendidikan dalam bahasa arab adalah “tarbiyah” dengan kata kerja “Rabba”, kemudian dalam arti yang lain terdapat istilah “Ta’lim” yang berarti pengajaran dengan kata kerja “Allama”. Kata lain yang mengandung arti pendidikan adalah “Ta’dib” yang berasal dari kata “Addaba”. Semua istilah pendidikan

tersebut sudah digunakan pada zaman Nabi baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits (Daradjat 2017). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi Pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan tata laku individu atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pemberian latihan (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran sesuai dengan nilai-nilai ajaran islam (Nasional, 2008).

Sedangkan dalam Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) tahun 2003 disebutkan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peadaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manuisia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlq mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan menurut H.A.R Tilaar adalah proses pembudayaan, artinya pendidikan bertujuan membentuk manusia yang berbudaya, yakni berkembangnya kepribadian seseorang yang demokratis. Selain itu, H.A.R Tilaar menambahkan pendidikan Islam menjadikan manusia yang berbudaya Islami (Lilik Nur Kholidah dkk. 2019). Sedangkan menurut pandangan Mansour Fakh, pendidikan pada dasarnya adalah proses mengembalikan kembali manusia pada konsep fitrahnya dengan penerapan metode popular education. Pendidikan tidak lain adalah proses refleksi kritis terhadap ideologi dominan menuju transformasi sosial (Fakh, 1996).

C. Moderasi Beragama (*Wasathiyyah*)

Secara bahasa, moderasi berasal dari bahasa Inggris *moderation*, yang memiliki arti sikap sedang, sikap tidak berlebihan. Adapun dalam Kamus Bahasa Indonesia, moderasi diartikan sebagai pengurangan kekerasan dan penghindaran ekstremisme. Adapun sikap moderat diartikan sebagai sikap selalu menghindar

dari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan kecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah, pandangannya cukup, serta mau mempertimbangkan pihak lain. Sedangkan kata *moderator* adalah orang yang bertindak sebagai penengah (hakim, wasit, dan sebagainya), pimpinan sidang (rapat, diskusi) yang menjadi pengarah pada acara pembicaraan atau pendiskusan masalah.

Makna-Makna yang diuraikan di atas sejalan dengan konsep moderasi walaupun tidak seluas makna moderasi yang digunakan oleh pakar-pakar bahasa Arab, terlebih yang menjadikan Al-Quran sebagai rujukan. Dalam bahasa Arab, moderasi sering diungkapkan dengan kata *wasatiyyah*. Dalam kamus-kamus bahasa Arab, kata *wasatiyyah* terambil dari kata *wasatha* yang mempunyai sekian banyak arti.

Konsep *wasatiyyah* dalam beberapa literatur ditafsirkan secara beragam oleh para ahli. Menurut al-Salabi kata *wasattiyah* memiliki banyak arti. *Pertama*, konsep *wasathiyyah* dari akar kata *wasath*, berupa *dharaf*, yang berarti *baina* (antara). *Kedua*, dari akar kata *wasatha*, yang mengandung banyak arti, diantaranya: (1) berupa isism (kata benda) yang mengandung pengertian antara dua ujung; (2) berupa sifat yang bermakna (*khiyar*) terpilih, terutama, terbaik; (3) *wasath* yang bermakna *al-'adl* atau adil; (4) *wasath* juga bisa bermakna sesuatu yang berada dinatara yang baik (*jayyid*) dan yang buruk (*radi'*). Ali Muhammad Muhammad al-Salabi, *al-Wasathiyyah fi al-Qur'an al-Karim* (Futaqi, 2018).

Sama dengan pemaknaan al-Sallabi, Kamali menganalisis *wasattiyah* sinonim kata *tawassuṭ*, *I'tidāl*, *tawāzun*, *iqtiṣād*. Istilah moderasi ini terkait erat dengan keadilan, dan ini berarti memilih posisi tengah di antara ekstremitas. Kebalikan dari *wasathiyyah* adalah *tatarruf*, yang menunjukkan makna “kecenderungan ke arah pinggiran” “ekstremisme,” “radikalisme,” dan “berlebihan”. Mohammad Hashim Kamali, *The Middle*

Path of Moderation in Islam: the Qur'anic Principle of Wasathiyah (New York: Oxford University Press, 2015). Sedangkan Qardhawi mengidentifikasi *wasathiyah* ke dalam beberapa makna yang lebih luas, seperti adil, istiqamah, terpilih dan terbaik, keamanan, kekuatan, dan persatuan. Yusuf Qardhawi, *al-Kalimat fi al-Wasathiyah al-Islamiyah wa Ma'alimaha*.

Bertolak dari beragam pemaknaan di atas, Hilmy mengidentifikasi beberapa karakteristik penggunaan konsep moderasi beragama dalam konteks Islam di Indonesia, diantaranya ; (1) ideologi tanpa kekerasan dalam menyebarkan Islam; (2) mengadopsi cara hidup modern dengan semua turunannya, termasuk sains dan teknologi, demokrasi, hak asasi dan sejenisnya; (3) penggunaan cara berpikir yang rasional; (4) pendekatan kontekstual dalam memahami Islam, dan; (5) penggunaan ijtihad (kerja intelektual untuk membuat opini hukum jika tidak ada justifikasi eksplisit dari Al-Qur'an dan Hadist). Lima karakteristik tersebut dapat diperluas menjadi beberapa karakteristik yang lain seperti toleransi, harmoni dan kerjasama antar kelompok agama (Ampel, 2013).

D. Konsep Moderasi Beragama dalam Berbagai Agama

Konsep moderasi beragama ternyata tidak hanya ditemukan dalam Agama Islam, namun konsep moderasi beragama juga terdapat pada semua agama yang diakui di Indonesia. Dalam Islam, dikenal konsep *wasattiyah*, yang memiliki padanan makna dengan kata *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). Orang yang menerapkan konsep *wasattiyah* bisa disebut *wasith*.

Dalam agama Kristen, juga mengajarkan moderasi beragama, dimana konsep ini menjadi cara pandang untuk menengahi tradisi ekstremitas tafsir ajaran Kristen yang dipahami sebagian umatnya. Dalam memperkuat moderasi beragama adalah melakukan interaksi semaksimal mungkin antara agama yang satu dengan agama yang lain, antara lain yang satu

dengan aliran yang lain dalam internal umat beragama.

Moderasi beragama juga dapat dilihat dalam perspektif Gereja Katolik. Dalam Gereja Katolik istilah moderat dikenal dengan istilah “terbuka” terhadap “fundamentalis” dan “tradisionalis” (golongan yang menolak pembaharuan dalam pengertian Gereja Katolik). Adapun dalam ajaran agama Hindu, dikenal istilah susila, yaitu menjaga hubungan yang harmonis antara sesama manusia, yang menjadi hubungan salah satu dari tiga penyebab kesejahteraan. Kasih sayang adalah hal yang utama dalam moderasi pada semua agama.

Dalam ajaran Buddha, esensi dari jadi konsep moderasi beragama dapat ditemukan dari Sidharta Gautama dari pencerahan Sang Buddha, yang memuat empat prasyarat, yaitu berusaha menolong semua makhluk, menolak semua nafsu keduniawian, mempelajari, menghayati, dan mengamalkan Dharma, serta berusaha mencapai Pencerahan Sempurna. Moderasi beragama juga telah lama mengakar pada ajaran agama Konghucu. Ying Yang menjadi landasan umat Konghucu memandang kehidupan yang *junzi* (beriman dan luhur budi). *Yin yang* adalah Sikap Tengah, bukan sikap ekstrem. Sesuatu yang kurang sama buruknya dengan suatu yang berlebihan (Fahri and Zainuri, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana berupaya memposisikan diri di luar dari konteks sosial sumber data (informan) dan berupaya untuk memahami makna yang dituturkan. Penelitian ini berupaya untuk menggali gagasan tokoh masyarakat tentang pendidikan moderasi beragama. Konsep moderasi beragama terdiri atas dua konsep yaitu pendidikan dan moderasi beragama. Pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sistem pendidikan, sementara materinya adalah moderasi beragama. Karenanya ada dua aspek yang akan digali dari gagasan tokoh masyarakat, yaitu

substansi atau materi moderasi beragama dan sistem penyelenggaraan pendidikan moderasi beragama. Materi moderasi beragama mencakup nilai-nilai agama dan budaya tentang moderasi beragama, sementara sistem penyelenggaraan mencakup kebijakan publik dan proses pengajaran.

Sumber data penelitian ini adalah tokoh masyarakat, yang menyasar tokoh agama, tokoh pemerintahan, dan tokoh pendidik. Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tokoh masyarakat dalam penelitian ini adalah:

- a. Tokoh agama di Kota Parepare adalah pimpinan pondok pesantren Hidayatullah Kota Parepare Ustaz Saparuddin, ketua MUI Kota Parepare Dr. K.H. Halim Kuneng, yang mana dari para tokoh agama ini dieksplorasi tentang nilai-nilai agama berkaitan dengan moderasi beragama.
- b. Tokoh pemerintahan, yaitu Safar Muchtar sebagai politisi PAN, yang mana darinya dieksplorasi tentang berbagai alternatif kebijakan publik untuk menerapkan pendidikan moderasi beragama.
- c. Tokoh Pendidik, yaitu Dr. Abd Halik sekretaris dewan Pendidikan Kota Parepare dan dosen IAIN Parepare, yang darinya dieksplorasi tentang berbagai yang berkaitan dengan penyusunan kurikulum, alternatif model pendidikan (sekolah khusus, pendidikan integratif, pelajaran monolitik, pembelajaran integratif, atau lainnya).

Data yang terhimpun dari para peneliti akan diolah ulang untuk menarik kesimpulan gagasan pokok berdasar fokus penelitian. Pengolahan data itu dilakukan dengan tahapan: identifikasi data, klasifikasi data, reduksi data yang tidak terkait dengan fokus penelitian, strukturisasi data berdasarkan kerangka analisis, menghubungkan (korelasi) data berdasarkan struktur data, penginterpretasi hasil korelasi data bersama beberapa nara sumber ahli, penyimpulan, dan pelaporan. Hasil temuan yang diperoleh oleh masing-

masing peneliti akan disintesa, sehingga melahirkan sebuah atau beberapa rumusan tentang pendidikan moderasi beragama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perspektif Tokoh Masyarakat Tentang Pendidikan Moderasi Beragama

Sebelum membahas mengenai perspektif tokoh masyarakat Kota Parepare mengenai pendidikan Moderasi beragama, terlebih dahulu peneliti akan menyajikan perspektif tokoh masyarakat Kota Parepare mengenai moderasi beragama. Berikut kutipan wawancara tokoh masyarakat Kota Parepare yang menyatakan kesepakatannya dengan konsep moderasi beragama yang digagas oleh Kementerian Agama Republik Indonesia;

“Wasathiyah yah? sebenarnya Islam memang harus begitu, dalam surah alfatihah sendiri menjelaskan begitu ihdinasdziratal mustaqim, bahkan diayat terakhir goiril magdubi alaihim waladdollin, kita tidak boleh kiri tidak boleh juga terlalu kanan, memang Islam itu wasathiyah, kehadiran Islam itu memang untuk menengahi” (Ustaz Saparuddin, Wawancara 27/08/2020)

“Istilah moderasi beragama itu kan dulu islam moderat berkembang lagi istilah toleransi beragama, kerukunan dalam beragama itu istilah pancasila, nanti belakangan ini baru muncul moderasi beragama. Jadi moderasi beragama itu salah satu sudut pandang yang melihat bahwa pentingnya pemahaman agama itu ada ditengah-tengah itu ya, bukan ke kanan bukan ke kiri. Ke kanan itu agak konservatif atau yang radikal-radikal itu atau ke kiri yang agak liberal,

yang arah ke komunis juga bisa. Jadi pertengahan ya, islam wasatan istilahnya”
(Dr.Abd Halik, wawancara 7/09/2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di Kota Parepare dapat dinyatakan bahwa pada umumnya tokoh masyarakat di Kota Parepare sepakat dengan konsep *wasathiyah* atau moderasi beragama yang digagas oleh Kementerian Agama, Bahwa moderasi beragama adalah sikap beragama yang seimbang antara pengalaman agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama yang niscaya akan menghindarkan dari sikap ekstrem berlebihan, fanatik dan sikap revolusioner dalam bergama. Serta dapat menjadi solusi atas hadirnya dua kutub ekstrem dalam beragama, kutub ultra-konservatif atau ekstrem kanan di satu sisi dan liberal atau ekstrem kiri di sisi lain dan dapat menjadi kunci terciptanya toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam tingkat lokal, nasional, maupun global.

Meskipun demikian, peneliti menemukan bahwa masih terdapat tokoh masyarakat yang belum familiar dengan konsep moderasi beragama. Bahkan ada pula yang menyamakan konsep moderasi beragama dengan modernisasi. Hal ini semakin memperkuat asumsi akan istilah moderasi beragama yang belum tersosialisasikan dengan baik dan merata dan hanya familiar pada lingkaran “elit” di Kementerian Agama.

Terdapat empat indikator moderasi beragama yang digagas oleh Kementerian Agama yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Indikator-indikator tersebut yang dijadikan sebagai pijakan untuk mengenali seberapa kuat moderasi beragama yang dipraktikkan oleh seseorang dan seberapa besar kerentanan yang dimiliki. Kerentanan tersebut perlu ditemukenali lebih dini dengan tujuan agar

langkah yang tepat juga dapat disusun sedini mungkin untuk melakukan penguatan moderasi beragama.

Dari empat indikator moderasi beragama yang digagas oleh Kementerian Agama, mengerucut pada dua indikator yang banyak menuai pro kontra dan kekeliruan maupun kesalahpahaman dalam penerjemahannya maupun batasan-batasannya. Indikator yang dimaksud adalah sikap toleransi sikap akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Berikut kutipan wawancara dengan pimpinan pondok pesantren Hidayatullah Kota Parepare :

“Konsep moderasi beragama yang dimaksud oleh Kementerian Agama itu saya kira bagus, seperti itulah Islam seharusnya, sisa mana batasan yang memang...misal budaya, budaya itukan dalam kaidah selama budaya itu tidak bertentangan dengan agama kita, maka itu dilestarikan dan itu akomodir oleh syariat, yang salah itu ketika budaya bertentangan dengan agama kita, dikarenakan aturan yang ril itukan agama dan itu aturan dari Tuhan, budaya itukan kebiasaan kita, adat istiadat kita, tentu yang diutamakan adalah aturan dari Tuhan itu”
(Ustaz. Saparuddin, Wawancara 27/08/2020).

Selanjutnya perspektif tokoh masyarakat mengenai pendidikan moderasi beragama. Berikut kutipan wawancara oleh ketua MUI Kota Parepare yang menyatakan bahwa moderasi beragama urgen untuk diregenerasi dalam dunia pendidikan. Dengan tujuan untuk menanamkan cikal bakal dan generasi muda yang tidak rigid terhadap kemajemukan.

“Moderasi beragama perlu diregenerasi dalam dunia pendidikan khususnya kepada pemuda-pemudi untuk mencegah terjadinya benturan-benturan dikemudian hari.

Pemuda perlu mengetahui eksistensi semua agama yang diakui di Indonesia, dan untuk menjaga supaya kita hidup aman, perlu dibekali toleransi beragama. Bahwa semua agama di Indonesia harus menjaga hubungan yang harmonis, dan dalam kaidah agama disebut ukhuwah wathaniyah” (Dr. KH. Halim Kuneng, wawancara 1/09/2020).

B. Gagasan Materi Tentang Pendidikan Moderasi Beragama

1. Komitmen Kebangsaan

Komitmen kebangsaan (nasionalisme) merupakan hal penting dalam pendidikan. Agama dan nasionalisme adalah sebagai senjata ampuh bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dan merekatkan persatuan dan kesatuan. Sehingga, ketika ada segelintir masyarakat atau kelompok tertentu yang mengklaim antara hubungan nasionalisme dengan agama dapat disinyalir sebagai cara-cara kelompok tertentu memecah semangat persatuan dan kesatuan di Indonesia. Maka dari itu, nilai cinta tanah air dan nasionalisme penting untuk ditanamkan kepada peserta didik sedini mungkin guna menumbuhkan kesadaran dan komitmen kebangsaan yang tinggi. Hal ini dilakukan dengan pemberian pemahaman agama yang moderat seperti Islam wasathiyah rahmatan lil ‘alamin. Bahkan KH. Halim Kuneng selaku ketua MUI Kota Parepare menyatakan bahwa

“hubbul wathan minal iman, yang artinya mencintai tanah tair adalah bagian dari iman” (KH.Halim Kuneng, Wawancara 1/09/2020).

Selain itu, lebih lanjut KH. Halim Kuneng menguraikan bahwa ini dapat dibuktikan dengan hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yakni Rasulullah SAW jika datang dari bepergian, kemudian melihat dataran

tinggi Madinah, Beliau mempercepat jalan untanya, dan bila menunggang hewan yang lain, Beliau memacunya. Hadist ini menjadi dalil dua hal. Pertama, keutamaan Madinah itu sendiri, dan yang kedua dianjurkannya mencintai bangsa dan merindukannya.

Hal ini semakin menegaskan bahwa paham kebangsaan sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an dan sunnah. Bahkan semua unsur yang melahirkan paham tersebut, inklusif dalam ajaran Al-Qur’an, sehingga seorang muslim yang baik dapat dipastikan adalah masyarakat dari suatu bangsa yang baik. Suatu bangsa terdiri dari beragam agama atau anggota masyarakat terdiri dari berbagai bangsa, hendaknya mereka dapat menghayati firman-Nya

وَلِكُلِّ وَّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ
أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya : Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu (Q.S Al-Baqarah:148)

2. Toleransi

Menurut Umar Hasyim (1979) dalam Herlina (2018) menyatakan bahwa toleransi adalah pemberian kebebasan kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing, selama dalam menjalan dan menentukan sikapnya itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat atas terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat. Toleransi selain diatur dalam undang-undang yaitu Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 73 UU HAM, namun juga telah diatur dalam ajaran agama masing-masing. Lebih lanjut misalnya

dalam Islam, KH. Halim Kuneng menyampaikan beberapa dalil naqli yang berkaitan dengan toleransi beragama :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

Artinya : Tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Sungguh telah jelas antara kebenaran dan kesesatan (Q.S. Al Baqarah:256)

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Artinya : Bagimu agamamu, bagiku agamaku (Q.S Al-Kafirun Ayat 6)

Ayat di atas dapat ditafsirkan bahwa manusia perlu membangun, menjalin dan merawat relasi sosialnya dengan sesama manusia, sedangkan dalam ranah teologis tidak ada kompromi.

Surah Al-Hujurat Ayat 13

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Berdasarkan wawancara dengan Dr. Abd Khalik sebagai sekretaris dewan pendidikan Kota Parepare, menyatakan bahwa secara umum toleransi di Kota Parepare hingga saat ini dapat dikatakan baik, namun tetap harus dikawal dan terus dirawat.

“Pertama komitmen kebangsaan saya kira tidak ada masalah, kemudian yang kedua masalah toleransi untuk sementara di Kota Parepare sudah sangat bagus. Jadi menurut saya Parepare ini kan plural jadi miniatur Indonesia. ada Vihara,

Gereja dan banyak jenisnya di Parepare untuk selama ini tidak ada konflik SARA, lalu dialog antar umat beragama juga berjalan lancar dan diprakarsai oleh ormas-oramas, Dua lalu saya meneliti tentang pluralism di Parepare yang dihubungkan dengan istilah bugis itu pangadereng. Jadi memang Parepare ini adalah miniatur toleransi yang sangat tinggi” tetapi tetap harus dikawal, dirawat (Dr.Abd Khalik, Wawancara 1/09/2020).

Lebih lanjut KH.Halim Kuneng menyatakan bahwa

“Hubungan dalam berbangsa dan bernegara itu harus terjalin harmonis, apakah internal umat Islam itu sendiri, yang kedua umat islam dan pemerintah, kemudian yang ketiga adalah antara umat Islam dengan pemeluk agama lain itu diikat dengan ukhuwah basyariah dan seluruh umat manusia sebenarnya pada prinsipnya adalah kita bersaudara, karena kita ini berasal dari satu nenek moyang, yaitu nabi Adam, oleh karena itu hubungan kita dengan mereka yang berbeda latar belakang keyakinan tetap kita dituntut untuk menjaga hubungan yang harmonis, karena apanamanya eee.. hidup membangun negara ini tidak cukup kalo kita saja umat Islam, semua umat manusia dan penganut paham keagamaan harus bersatu padu di dalam membangun negara, karena kita semua yang menikmati apanamanya itu kalo negara aman, semua umat beragama akan menikmati bersama dalam beragama maupun umat beragama lain, oleh karena itu

hubungan itu harus dijaga dengan baik” (KH.Halim Kuneng, Wawancara 1/09/2020).

3. Anti Kekerasan

Sesuai dengan istilah moderasi beragama, yang mana berarti merujuk pada sikap mengurangi kekerasan, atau menghindari keekstreman dalam praktek beragama. Salah satu ancaman terbesar yang dapat memecah belah sebuah bangsa adalah konflik berlatar belakang agama, terutama yang disertai dengan aksi-aksi kekerasan. Karena agama dan pemeluknya memiliki sifat dasar keberpihakan yang sarat dengan muatan emosi dan subjektivitas tinggi. Meskipun kekerasan dan ekstremisme bukan merupakan esensi dari ajaran agama mana pun. Sehingga dengan kehadiran moderasi beragama dapat menjadi upaya internalisasi nilai-nilai moral spiritual agama, dan menciptakan kehidupan beragama yang nirkekerasan.

وَلِكُلِّ وَّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ
اِنَّ مَا تَكُوْنُوْنَ اٰتٍ بِكُمْ مِنَ اللّٰهِ جَمِيعًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ
عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Artinya : Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.

4. Akomodatif Terhadap Budaya Lokal

Kota Parepare tidak hanya dihuni oleh berbagai pemeluk agama dan aliran kepercayaan, namun kota ini juga dihuni oleh beberapa etnis, baik dari berbagai etnis yang berasal dari Sulawesi Selatan, maupun etnis yang berasal dari luar Sulawesi Selatan. Meskipun demikian, etnis Bugis tetap merupakan etnis mayoritas masyarakat di Kota Parepare. Kota ini

kemudian menjadi perjumpaan-perjumpaan berbagai etnis, sehingga masyarakat yang datang dan menetap di Kota Parepare membawa tradisi dan kebudayaannya masing-masing, namun tetap beradaptasi dengan karakteristik Kota Parepare. Sejalan dengan hasil wawancara dengan Dr.Abd Khalik yang menyatakan bahwa “

“Di sini ada kampung Duri, Duri itukan enrekanng ya. Tapi di situ selalu terdengar bahasa Bugis, karena terakomodir. Kemudian di Sumpang ada kampung Mandar tapi kalo berinteraksi semua pake bahasa bugis, nanti dalam rumah baru pakai bahasa mandar. Nah itu artinya, mengakomodir kearifan lokal itu ya” (Dr.Abd Khalik, Wawancara 1/09/2020).

Sehingga saat ini, untuk menemukan tradisi dan budaya khas Kota Parepare adalah sesuatu yang cukup sulit.

“Kearifan lokal di Parepare itu ya kalo mau dirunut, tentukannya karena kosmolitnya ini sehingga ada budaya pinrang, budaya sidrap, bone datang di sini menyatu, sehingga otentistasnya Parepare itu menjadi redup. Apasih sebenarnya budaya otentiknya Parepare, kalo payung besarnya adalah Bugis. Itu yang bisa diungkap kepermukaan kalo pemerintah daerah mengbackupnya. Membentuk melengkapi instrumennya tadi” (Dr.Abd Khalik, Wawancara 1/09/2020)

Tradisi *Mappadendang* adalah salah satu tradisi yang masih terbilang eksis dilaksanakan oleh masyarakat asli Kota Parepare, khususnya masyarakat Watang Bacukiki. Tradisi ini umumnya dilaksanakan oleh masyarakat Bacukiki untuk merayakan kesyukuran kepada *Dewatae* atas hasil panen padi yang melimpah (Junida, 2020). Tradisi

Mappadendang adalah salah satu warisan asli kebudayaan Bugis yang diadakan untuk menyatukan rasa kebersamaan antara petani dan masyarakat sekitar (Rakhmat and Jeanny Maria Fatimah 2016). Dalam pelaksanaan tradisi ini, menjadi wadah perjumpaan dan pembauran pemerintah dan masyarakat dari berbagai lapisan etnis dan agama di Kota Parepare.

Suku Bugis terkenal memiliki budaya yang sangat dinamis dalam kehidupan bermasyarakat. Orang Bugis dalam berinteraksi di tengah masyarakat, senantiasa menjadikan *ade'* sebagai landasan dalam perkataan dan perbuatan. Dalam artian adanya kesesuaian atau keselarasan antara perkataan dan perbuatan. Sehingga berdasarkan pada prinsip tersebut, orang Bugis dalam kesehariannya mengedepankan *taro ada taro gau*. *Ade'* dalam orang Bugis memberikan kekuatan untuk *mabbulo sipappa* yakni melestarikan persatuan dan kesatuan untuk hidup rukun dan damai. Sehubungan dengan itu, orang Bugis banyak mengimplementasikan nilai-nilai kebiasaan yang menjadi *ade'* termasuk dalam saling membantu dengan orang lain, misalnya "*mali siparappe, rebba sipatokkong, malilu sipainge, sirui menre tessirui no'*". Makna filosofis dari petuah itu bahwa jika yang satu merasakan sakit maka mereka semua yang harus menanggung bebannya, membantu yang lemah yang lemah agar menjadi kuat, demikian halnya mereka saling bahu membahu untuk menegakkan kebenaran. Orang Bugis tentang *ade'* merupakan penentu yang pokok dalam mewujudkan dari gerak-gerik sebagai ukuran pada peristiwa dimasa silam.

Orang Bugis menjalankan *ade'* dalam kehidupan sistem sosial budaya telah meyakini sebagai pedoman untuk setiap anggota masyarakat. Melalui sistem itu maka bagi orang Bugis pada saat membawa dirinya masyarakat dituangkan dalam sistem *pangngaderreng*. Sistem *pangngaderreng* yang dimaksud adalah melainkan dalam diri orang Bugis telah mendarah daging *ade'*, *bicara*, *rapang*, *wari*, dan *shara'*. Sistem *Pangngaderreng*

mengantarkan orang Bugis dalam kehidupan sosial masyarakat, merupakan peraturan yang harus ditaati. Sistem *pangngaderreng* meliputi kebiasaan yang disebut *ade'*, dan *shara'* merupakan bentuk pelaksanaan orang Bugis dalam menjalankan agama. Dengan begitu, orang Bugis selain taat pada *ade'* juga taat pada agamanya. Hal itu tetap dipertahankan meskipun orang Bugis mengalami pergeseran waktu dalam menghadapi perkembangan zaman. Kelihatannya sistem *pangngaderreng* bagi orang Bugis begitu kuat untuk dilaksanakan tanpa dapat dipengaruhi oleh keadaan dan waktu. Sejalan dengan wawancara dengan Dr. Abd. Khalik, sebagai berikut:

kemarin itu ketika saya meneliti tentang pangngaderreng, pendekatan kearifan lokal dalam membangun toleransi, rupanya Parepare ini, harus dibangun dengan pondasi kearifan lokal. Contohnya ya china di Parepare saja sudah bisa bahasa Bugis, jadi itu artinya untuk membangun toleransi, membangun keharmonisan di Parepare itu harus diakomodir kearifan lokal" (Dr.Abd Khalik, Wawancara 1/09/2020).

Adapun nilai-nilai yang menjadi bingkai dalam penyelenggaraan tata pergaulan kemasyarakatan termasuk keberagaman serta pemerintahan di Kota Parepare didasarkan pada tradisi masyarakat Kota Parepare dan prinsip-prinsip penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat termasuk beragama dalam bentuk, sebagai berikut :

1. *Sipakatau, sipakalebbi, simase-maseang*; Saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi antara satu dengan yang lain dan senantiasa berlaku bijak duduk bersama mencari jalan keluar suatu permasalahan sebagai wujud pengakuan atas kesederajatan manusia ciptaan Tuhan.
2. *Mali Siparappe, malilu sipakainge, siwata menre tassiwata no*; Saling mengingatkan, saling membantu dan

- tidak menjatuhkan
3. *Massidi siri, massidi gau;* Bermusyawarah dan bertukar pikiran antara masyarakat (sesama pemeluk) sebagai suatu keluarga untuk mencari solusi yang terbaik dalam suasana interaksi komunikatif yang kondusif.
 4. *Lempu getteng, ada tongen, temmapasilaingeng;* Jujur, tegas, berani, kuat dalam pendirian, perpegang pada kebenaran serta berlaku adil pada semua pihak.

Hal menarik yang ditemukan oleh peneliti adalah terdapatnya tokoh agama dari pondok pesantren Hidayatullah Kota Parepare yang memiliki latar belakang organisasi ataupun identitas keagamaan yang selama ini dikenal kental tidak melaksanakan ritual-ritual budaya lokal. Namun hal tersebut, tidak membuatnya menutup ruang bahkan mengakomodasi apabila masyarakat sekitar mengajukan permintaan akan pemenuhan unsur agama dalam ritual tradisi maupun budaya lokal. Berikut kutipan wawancara dengan ketua pondok pesantren Hidayatullah Parepare Ustaz Saparuddin :

“kita tidak merayakan (maulid, dst), tapi kemudian kalo masyarakat meminta kita, kita tetap akomodir. Misalnya di sini ada orang meninggal, mereka minta untuk ngaji, kita pergi ngaji, orang, minta taksiyah, kita taksiyakan. Kita melihatnya artinya kita tidak seekstrim bahwa karena masyarakat inikan mau.. karena tidak semua sama pemikirannya, yang penting standar nilai sudah ada, standar nilai kita inikan agama yang harus selalu dijaga, kemudian yaitu budaya. Ketika sesuatu itu masih ada peluang, celah untuk kemudian kita bisa masuk di sana kenapa tidak kan gitu.. yang kita tidak ada kompromi itu kalo sudah bicara kesyirikan, tapi kalo hal-hal yang masih kemudian terlepas,

kalo pelaksanaannya sih mungkin kita sudah tidak, artinya kita sudah tidak masuk disitu, tapi kemudian ketika ada orang membutuhkan kita untuk menjelaskan persoalan-persoalan itu tadi dan kita tidak kemudian mereka yang melakukan lalu dibilangi sesat, tidak (Ustaz Saparuddin, Wawancara 03/09/2020)

Berdasarkan kutipan wawancara dengan ustaz Saparuddin, poin penting yang ingin ditunjukkan bahwa walaupun ustaz Saparuddin dengan latar belakang keorganisasiannya tidak melakukan ritual tradisi kebudayaan lokal Kota Parepare, tidak menandakan kekontraannya akan budaya lokal sepanjang tidak kontradiktif dengan ajaran-ajaran Islam.

C. Gagasan Tentang Sistem Pembelajaran Pendidikan Moderasi Beragama

Dalam menerapkan sistem pembelajaran pendidikan moderasi beragama khususnya di Kota Parepare, hal pertama yang menjadi perhatian dan menjadi segmentasi pendidikan moderasi beragama adalah kapasitas dan kapabilitas guru dalam melakukan transfer *knowledge* dan *value* moderasi beragama kepada peserta didik. Hal ini sejalan dengan pendapat Dr.Abd. Khalik yang menyatakan bahwa

“Menurut saya, yang pertama adalah ke personnya atau tenaga pendidik/guru. jadi sekarang ada juga di sekolah/Guru umum justru dia yang eksklusif, karena mengikuti kajian-kajian tertentu atau paham dan ketika mengajarkan pelajaran umum kadang memberikan doktrin tertentu. Yang pertama itu segmentasi moderasi beragama adalah guru, dulu ada senior pertama dilantik menyatakan ada beberapa guru, bukan hanya

guru agama tapi guru umum yang punya paham-paham tertentu bersifat eksklusif tertutup. Nah ini kadang ada anak-anak setelah diajar dikelas dibawah kerumah atau dimana untuk ikut kajian-kajian lanjutan terutama di SMA” (Dr.Abd Khalik, Wawancara 1/09/2020).

Lebih lanjut Dr. Abd. Khalik menguraikan bahwa dalam penerapannya pendidikan moderasi beragama, selain kapasitas dan kapabilitas guru, juga harus *dibackup* oleh sistem yang ada di sekolah. Karena terdapat juga beberapa kasus dijumpai, kadang guru menggunakan paham Islam moderat tapi tidak didukung oleh sistem di sekolah yang diciptakan kepala sekolah. Disamping itu komite sekolah juga perlu memainkan perannya, karena komite sekolah juga memiliki kewenangan, demikian sebaliknya pihak sekolah harus membuka diri menerima aspirasi oleh pihak komite sekolah.

“Bagi saya itu pendidikan moderasi beragama itu ya, yakni pendidikan yang bersifat inklusif ya, terbuka membawa toleransi. jadi saya pikir kalo di Sekolah umum itu semua mengembangkan pendidikan moderasi dalam hal beragama kecuali swasta yang dibina oleh mazhab-mahzab tertentu dalam beragama yang kurang tersentuh oleh Kementerian Agama ya mungkin ada juga yang seperti itu yang bersifat eksklusif. (Dr.Abd Khalik, Wawancara 1/09/2020).

Setelah tersedianya tenaga pendidik yang berpaham moderat, dan dengan adanya dukungan dari pihak sekolah dan komite sekolah, maka selanjutnya adalah bagaimana menggodok kurikulum pendidikan moderasi beragama. Dalam menyusun kurikulum, hal awal dan penting adalah bagaimana membuat peta analisis eksternal-internalnya, mengenai kondisi

yang terjadi. Kemudian profil luarannya yang terkait dengan konsep-konsep moderasi beragama, capaian pembelajaran. Selanjutnya mengintegrasikan keilmuan misalnya mata pelajaran umum yang dapat dimasukkan nuansa moderasi beragama. Misalnya Pelajaran matematika, nuansa moderasi beragama dapat disisipkan, dapat juga dilakukan dengan membedah kurikulumnya. Kemudian pada mata pelajaran yang bernuansa agama, terkadang ditemui pelajaran beragama yang materinya bersifat terlalu normatif, yang seharusnya dapat lebih ditekankan pada pemberian nuansa kontekstual atau bagaimana materi pembelajaran menggunakan pendekatan yang sesuai dengan realitas kehidupan siswa agar siswa dapat dengan mudah menerima dengan baik menerima materi pembelajaran. Berikut kutipan wawancara Dr.Abd Khalik :

“Bagi saya pendekatan kurikuler itu ya.. harus dibangun dengan kurikulum setelah materi pemetaan keilmuan, kemudian desain pembelajarannya melahirkan rpp/rps menyusun pengalaman belajar didalamnya ada media, metode dan ada penilaian jadi penting dibangun dalam konsep kurikulum” (Dr.Abd Khalik, Wawancara 1/09/2020).

Penerapan sistem pendidikan moderasi beragama selain dapat melalui kurikulum dan integrasi pada setiap mata pelajaran, juga dapat digunakan pendekatan ekstrakurikuler seperti bentuk pesantren kilat atau perkampungan bahasa. Kemudian yang terpenting juga adalah bagaimana membangun atmosfer kehidupan di sekolah. Dr.Abd Khalik menambahkan

“kalau bicara tentang akademiknya yaitu kurikulum, kalau manajerial yaitu lingkungan pendidikan dan kalau pembelajaran yaitu kepada gurunya kadang kan ada rps gurunya juga tetap radikal, dan rps ditinggalkan, maka dari itu guru jangan dibiarkan diberi

kesempatan membuat silabus sendiri, namun dibuatkan oleh tim kurikulum kemudian dibriefing sesuai learning outcome dan pengembangan ilmunya” (Dr.Abd Khalik, Wawancara 1/09/2020).

Secara umumnya, tokoh pendidikan memberi rekomendasi mengenai penerapan pendidikan moderasi beragama khususnya kota Parepare, bahwa jika berbicara dalam ruang lintas satuan pendidikan, maka perlunya membuka dialog, misalnya antar umat beragama dengan tokoh-tokoh lintas agama, yang kedua dengan lintas internal antar lintas ormas karena semua akan indah jika dialogkan. Sedangkan jika berbicara mengenai sektor sekolah, maka pendekatan menggunakan pendekatan *top down*, karena berdasarkan karakter dan sosialkultural orang Sulawesi itu pada umumnya dalam penyebaran islam mulai dari Raja, berbeda dengan Jawa dari rakyat jelata lama kelamaan masuk di keraton dan akhirnya raja adalah orang terakhir yang masuk Islam. Sedangkan di Sulawesi rajanya adalah orang yang pertama masuk Islam, raja yang memberi titah pada rakyatnya akhirnya rakyat *Saminah Waatonah*.

D. Gagasan Tentang Kebijakan Penerapan Pendidikan Moderasi Beragama

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat di Kota Parepare, memberikan gagasan mengenai kebijakan yang berkaitan mengenai penerapan pendidikan moderasi beragama;

Safar Muchtar sebagai politisi PAN menyatakan bahwa dalam menerapkan pendidikan yang bercirikan moderasi beragama, maka perangkat sekolah memiliki peran sangat besar dan fundamental. Misalnya, peran sekolah dalam melakukan filterisasi terhadap rohis dan kelompok-kelompok kajian di sekolah terhadap masuknya kelompok radikal maupun liberal sangat diperlukan. Sementara sekolah yang belum memiliki kelompok kajian-kajian keagamaan maupun rohis, maka perlu pihak sekolah perlu

melakukan aktivasi dan menyediakan ruang sehingga kebutuhan rohani peserta didik dapat terpenuhi. Karena sekiranya pemenuhan hasrat kerohanian peserta didik tidak terpenuhi, maka peserta didik akan mencari kelompok-kelompok kajian yang berada di luar sekolah. Selain itu, sekolah perlu membangun kerjasama atau menggandeng organisasi masyarakat yang kiprahnya nyata seperti NU dan Muhammadiyah yang memiliki segmentasi pengkaderan pelajar seperti IPNU dan IPM.

Ketua MUI Kota Parepare KH. Halim Kuneng menyatakan bahwa jika merujuk pada empat indikator moderasi beragama Kementerian Agama dalam kaitannya dengan penerapan pendidikan moderasi beragama, maka secara sosiokultural masyarakat Kota Parepare dalam hal kebudayaan lokal, masih perlu dicurahkan perhatian lebih. Selengkapnya kutipan wawancara dengan KH. Halim Kuneng :

“Saya kira yang terakhir itu perlu digenjot, seperti yang dikatakan tadi kebudayaan lokal begitu halnya jika dikaitkan dengan pendidikan moderasi beragama, karena masih banyak biasa yang menganggap bahwa kebudayaan lokal itu, notabene dianggap tidak dari agama, maka biasanya orang meremehkan orang yang katakanlah kental dengan budaya lokal. Misalnya kaitannya dengan masalah mappacini dalam pernikahan, itukan mappacci adalah tradisi lokal biasa dianggap bid’ah, padahal tradisi lokal itu selama tidak bertentangan dengan agama maka tidak apa-apa, saya kira seperti itu jadi tradisi seperti itukan ada kaidah-kaidah hukum yang bisa menjadi pegangan, seperti Al-’adatu muhakkamah” (KH. Halim Kuneng, wawancara 1/09/2020)

KH. Halim Kuneng mengutip kaidah fikih dari Mazhab Syafii, yaitu *Al-'adatu muhakkamah* yang bermakna, bahwa adat kebiasaan masyarakat yang dapat dijadikan sebagai sandaran hukum. Adat istiadat yang ada dibelahan dunia manapun selama secara teologi tidak bertentangan dengan ajaran agama, maka dapat dijadikan tradisi. Pandangan mengenai adanya anggapan sinkretisme, yakni mencampuradukkan tradisi dengan agama, menurut KH. Halim Kuneng bahwa selama tidak menyinggung persoalan teologis, maka sinkretisme tidak dilarang. Demikian halnya Dr. Abd. Khalik yang menyatakan bahwa *sistem panggadereng* yang mencirikan hidup masyarakat Bugis khususnya di Kota Parepare memerlukan perhatian dan dukungan dari pemerintah, berikut kutipan wawancaranya

“Kalo rekomendasi penelitian saya di Panggadereng itu ya harus diback up oleh pemerintah, instrumen, yang pertama itu adalah adanya unit yang bentuk oleh pemerintah untuk menengahi itu tentang budaya bugis Parepare. kemudian bekerjasama dengan semua komponen termasuk dinas, satuan-satuan kerja di lingkup pemerintah, kemudian ormas, bekerjasama untuk menginteraksikan, mengadaptasikan antara ajaran Islam, kristen, nasrani dengan kearifan lokal. Begitu juga dengan budaya bugis dengan budaya mandar, duri, makassar, Jawa. Supaya standar kita itu, standar kearifan lokal dan pendatang tau diri. Kita ini masuk di kampungnya orang, harusnya beradaptasi dengan sistem yang dibangun”
(Dr. Abd. Khalik, wawancara 1/09/2020)

KESIMPULAN

Secara umum tokoh masyarakat di Kota Parepare sepakat dengan konsep moderasi beragama yang disusun oleh Kementerian Agama dan urgensinya meregenerasi moderasi beragama ke dalam lembaga pendidikan. Konsep moderasi beragama yang belum familiar pada beberapa lapisan masyarakat. Gagasan materi agama yang disampaikan oleh tokoh agama memuat beberapa ayat terkait empat indikator moderasi beragama, serta pentingnya *hubbul wathan minal iman dan ukhuwah basyariah*. Tradisi Mappadendang yang menjadi wadah perjumpaan dan pembauran untuk menyatukan rasa kebersamaan pemerintah dan masyarakat dari berbagai lapisan etnis dan agama. Sistem *panggadereng* orang Bugis yang telah mendarah daging *ade', bicara, rapang, wari, dan shara'*. Tenaga pendidik adalah segmentasi pertama penerapan pendidikan moderasi beragama, sistem pembelajarannya dapat melalui pembentukan kurikulum, terintegrasi maupun injeksi melalui kegiatan ekstrakurikuler, serta atmosfer sekolah yang mendukung sistem. Sekolah melakukan filterisasi dan melakukan aktivasi kegiatan kerohanian serta menggandeng ormas untuk menumbuhkan pemikiran yang moderat. Dan menghidupkan kembali mata pelajaran muatan lokal, yang tentunya membutuhkan dukungan dari berbagai pemangku kebijakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis haturkan dengan terselesainya tulisan ini. Tentu tidak dengan usaha sendiri dari penulis, banyak pihak telah membantu dan berkontribusi dalam tulisan ini. olehnya penulis menghaturkan banyak terimakasih kepada Bapak Kepala Balai Litbang Agama Makassar atas yang telah memberi kesempatan untuk melaksanakan penelitian. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada rekan-rekan peneliti atas kesediaan waktu untuk berdiskusi dan memberikan masukan terkait substansi penelitian. Dan kepada

pengelola Jurnal Educandum penulis sangat berterimakasih diterbitkannya tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ampel, Iain Sunan. 2013. "WHITHER INDONESIA'S ISLAMIC MODERATISM? A Reexamination on the Moderate Vision of Muhammadiyah and NU 1 Masdar Hilmy." *Journal of Indonesian Islam*.
- Daradjat, Zakiah. 2017. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. https://doi.org/10.1163/_q3_SIM_00374.
- Fahri, Mohamad, and Ahmad Zainuri. 2019. "Moderasi Beragama Di Indonesia." *Intizar*.
- Fakih, Mansour. 1996. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*.
- Futaqi, Sauqi. 2018. "Konstruksi Moderasi Islam Wasathyyah Dalam Kurikulum Pendidikan Islam." *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*.
- Halik, Abdul, Idris Djamaluddin M, and Hamid Suraedah. 2017. "Pengembangan Kerukunan Dan Toleransi Antar Umat Beragama: Implementasi Sistem Panngaderreng Di Kota Parepare." In .
- Herlina, Lina. 2018. "DISINTEGRASI SOSIAL DALAM KONTEN MEDIA SOSIAL FACEBOOK." *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*. <https://doi.org/10.15575/jt.v1i2.3046>.
- Juergensmeyer, Mark. 1998. *Menentang Negara Sekuler: Kebangkitan Global Nasionalisme Religius*. Terj. Noorhaidi. Bandung: Mizan.
- Junida, Dwi Surti. 2020. "MAPPADENDANG SEBAGAI TRADISI BERSAMA KOMUNITAS TO WANI TOLOTANG DENGAN UMAT ISLAM." *Dialog*. <https://doi.org/10.47655/dialog.v42i1.319>.
- Lilik Nur Kholidah dkk. 2019. "Pendidikan Agama Islam Dan Penguatan Karakter Religius Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri." "Pendidikan Agama Islam Dan Penguatan Karakter Religius Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri."
- Nashuddin, Nashuddin. 2020. "Aktualisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Merevitalisasi Pemahaman Moderasi Pada Lembaga Pendidikan Di Indonesia." *JURNAL SCHEMATA Pascasarjana UIN Mataram*. <https://doi.org/10.20414/schemata.v9i1.2159>.
- Nasional, Departemen Pendidikan. 2008. *Pusat Bahasa Kamus Besar Indonesia*. <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160738315000444>.
- Rakhmat, Puspitasari, and Jeanny Maria Fatimah. 2016. "Makna Pesan Simbolik Non Verbal Tradisi Mappadendang Di Kabupaten Pinrang." *Kareba*.
- Ridhuan, Syamsu. 2019. "KOPERASI ERA MILLENNIAL DALAM PERSPEKTIF KETAHANAN Pendahuluan." *Jurnal Ekonomi* 10 (1).
- Shihab, Alwi. 1997. *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*. Bandung: Mizan.
- Sutrisno, Edy. 2019. "Aktualisasi Moderasi Beragama Di Lembaga Pendidikan." *Jurnal Bimas Islam*. <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i2.113>.
- Yewangoe, Andreas Anangguru. 2001. *Agama Dan Kerukunan*. BPK Gunung Mulia. https://doi.org/10.1163/_q3_SIM_00374.